

REFORMASI BIROKRASI DI UPT PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH KECAMATAN JATINUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG

Yayat Ruhiyat

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: ruhiyat@gmail.com

ABSTRACT. *This study aims to obtain a description of Bureaucratic Reform in Upt Agriculture and Food Security in Jatinunggal District, Sumedang District. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The research informants consisted of the head of Upt agriculture, head of administration, head of the program, secretary of the department of agriculture and food security, staff in the field of agricultural statistics, agricultural extension workers. Data collection techniques are carried out through literature studies and field studies consisting of interviews, observation and documentation. Data analysis was performed by data reduction, data presentation, drawing conclusions and combinations. The results of this study that the bureaucratic reform in Upt Agriculture and Food Security District Jatinunggal District Sumedang Regency: First, supported by organizational culture, which is still less conducive this can be seen in the observations of researchers who say that the leader in this case the leader is still acting authoritarian. Another supporting factor is the effectiveness of the Organizational Structure, as a whole the services at the UPT Agriculture and Food Security in Jatinunggal District are run with the current operational standard procedures, but there are several types of services that still have not been made SOPs such as convenience for beneficiaries in accessing services through the chart / service flow that actually provides information on the service process to be taken. Other factors Employee welfare with employee welfare or compensation is good and maximum, employees can get a number of things including work motivation, work loyalty, physical and mental health that is maintained, as well as strengthening relationships and work relationships between employees. Therefore the welfare of employees for every employee both civil servants and non-civil servants is required that the organizational goals of the Agricultural and Food Security Unit of Jatinunggal District be achieved. Other supporting factors are responsibility, the overall way to shape culture is to determine action steps, provide space for participation for employees and provide awards for employees who show a sense of responsibility.*

Keywords: *Bureaucratic Reform, Bureaucratic Reform Obstacles, Bureaucratic Reform Strategy*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun, hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik

masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja *formalistic* dan pengawasan yang ketat.

Pemerintahan Daerah agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, berkelanjutan demi terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka tercapainya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mengemban amanat reformasi birokrasi, UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal, sebagaimana disebutkan dalam Renstra UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal (2014-2018: 2), bermaksud memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi serta arah pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Misi pertama Kabupaten Sumedang adalah meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi, maka Pemerintahan UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal sesuai dengan misi tersebut, mengemban tugas mewujudkan tujuan dalam misi tersebut.

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di tingkat UPT Pertanian Kecamatan, di dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati. Dalam pemerintahan Kabupaten Sumedang, diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 55 tahun 2009 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada UPT melalui Dinas Sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Salah satu alasan dilakukan reformasi birokrasi di UPT Kecamatan Jatinunggal yakni, Birokrasi pemerintah pertanian dan ketahanan pangan dinilai masih belum mampu menyelenggarakan pelayanan yang transparansi dan akuntabel secara optimal; masyarakat masih menemukan banyak ketidakjelasan informasi dalam penyediaan pelayanan publik.

Diakui oleh Pemerintah UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Kecamatan Jatinunggal, bahwa dalam mengemban misi tersebut, ditemui beberapa kendala seperti:

1. Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur terkait keahlian dan keterampilan di masing-masing bidang yang terlihat dari hanya 20% pegawai dengan pendidikan S-1.
2. Terbatasnya wewenang kelembagaan pada sisi teknis dan kurang optimalnya struktur organisasi, pada sisi ketatalaksanaan.
3. Masih rentannya kesalahan administrasi dan pengelolaan kearsipan akibat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun prasarana pendukung, terutama dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi pemerintah tidak diperuntukan melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

TINJAUAN PUSTAKA

Birokrasi

Birokrasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, secara historis berasal dari kelompok elit (*priyayi*) sehingga kurang memahami kehidupan dan partisipasi masyarakat di lapisan bawah, sebagaimana diungkapkan oleh Gaffar (1999: 230), yang mengungkapkan bahwa: "Karena itu pada umumnya birokrasi menjadi kurang tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Birokrasi (*prangreh praja*) lebih dimaksudkan sebagai instrumen kekuasaan pemerintah, baik pemerintah kerajaan maupun pemerintahan kolonial".

Dalam pengertian Weberian, birokrasi adalah suatu tipe ideal, karena itu dalam bentuk yang murni memang tak berwujud dalam suatu masyarakat, karena organisasi formal yang terwujud dalam masyarakat hanya mendekati tipe ideal dalam derajat berlainan satu sama lain. Kemudian birokrasi dalam pengertian sebagai penyakit, yakni ketika keberadaan birokrasi itu dipandang tidak perlu dan hanya menambah panjang rantai alur suatu kegiatan pelayanan, sehingga jika suatu birokrasi dirasa panjang, lelet, berbelit-belit, memang seperti itulah birokrasi. Selanjutnya pengertian birokrasi secara netral, birokrasi organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang diangkat/ ditunjuk, disertai dengan aturan tentang kewenangan dan tanggungjawabnya, dan setiap kebijakan

yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat, dimana mandat pada sektor publik adalah rakyat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah suatu unsur organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan aturan, bagian, unsur, yang terdiri dari orang-orang yang seharusnya memiliki kompetensi, memiliki kewibawaan yang menekankan unsur tata susila, memiliki kemampuan teknis, sehingga birokrasi dapat dijadikan alat kontrol yang secara formal organisasi dapat mencirikan masyarakat modern dan bertujuan menjalankan tugas pemerintahan dalam mencapai kemaslahatan bersama dalam kehidupan masyarakat yang bernegara. Dalam kenyataannya birokrasi di Indonesia masih dalam proses perbaikan, yang memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

Reformasi Birokrasi

Dwiyanto (1995: 25), berpendapat "bahwa reformasi birokrasi adalah upaya untuk merubah nilai-nilai dan budaya yang selama ini menjadi dasar bagi berkembangnya praktik yang salah, untuk digantikan dengan nilai-nilai yang diinginkan". Dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi itu bertujuan menciptakan birokrasi yang rasional. Reformasi disektor publik menjadi sebuah kebutuhan terutama karena seringkali proses pembuatan keputusan yang tidak rasional serta staf birokrasi yang salah kelola, akuntabilitas yang tidak memadai, sehingga pelayanan publik menjadi tidak baik. lebih menekankan kepada persoalan perubahan budaya birokrasi yang mendasari dibutuhkannya reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pula reformasi birokrasi terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara praktik pemerintahan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan adanya upaya untuk merubah kebiasaan lama tersebut dengan kebiasaan yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses perubahan, tentu saja perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik, dengan strategi *top-down* sehingga diharapkan perubahan itu berlangsung dari atas ke bawah. Hal ini dapat dipahami sebab budaya *patron-client* dalam tubuh birokrasi masih sangat melekat sehingga dapat diharapkan dengan reformasi yang dilakukan secara *top-down* maka pelaksanaannya menjadi semakin efektif. Kebutuhan untuk memecahkan ketidakpastian dan perubahan yang cepat dalam sebuah lingkungan organisasi.

Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

Nilai yang akan dikembangkan dalam merformasi birokrasi, seyogyanya harus dirumuskan dan diregulasikan melalui kebijakan yang tepat, yang sesuai dengan keperluan pembangunan Indonesia, atas dasar ideologi, konsep dan model pembangunan di Indonesia, bukan model yang dikembangkan atau diusulkan pihak asing, dengan latar belakang budaya dan ideologi yang berbeda dengan Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sedarmayanti (2013:74), bahwa ada beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam membangun birokrasi di Indonesia, yakni:

1. Membangun visi birokrasi;
2. Membangun manusia birokrasi;
3. Membangun sistem birokrasi;
4. Membangun lingkungan birokrasi;

Hambatan Reformasi Birokrasi

Dalam penelitian ini, pendapat Dwiyanto (2012:5-7), bahwa terdapat beberapa hambatan di dalam proses reformasi birokrasi, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Persoalan kelembagaan
2. Persoalan ketatalaksanaan
3. Persoalan yang terkait dengan sumber daya aparatur
4. Persoalan Akuntabilitas

Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Strategi atau Upaya dalam Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak selalu berjalan mulus, penuh tantangan yang dihadapi, sebagaimana dikatakan Cepiku dan Mititelu (dalam Hanafi, 2012: 1) menjelaskan bahwa: Reformasi administrasi publik di Negara-negara Transisi (seperti Albania dan Rumania) memerlukan agenda yang sangat matang, karena sebelumnya tidak diprioritaskan dan tidak didefinisikan secara jelas dalam hal pelaksanaan yang efektif, meskipun mengacu pada keinginan yang kuat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif naturalistic*. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 4), mengatakan bahwa: "Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati".

Selain itu, Moleong (2006:6) mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian kualitatif, sebagai berikut. Penelitian kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami penelitian oleh subyek penelitian misalnya tentang perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi sumber datanya, yaitu:

1. Data Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data
2. Data sekunder, adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan lewat orang lain atau dokumen.

Dalam penelitian ini yang diamati adalah manusia, yaitu mengenai Reformasi Birokrasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya, tidak direayasa, dan mampu menganalisa masalah penelitian secara tuntas, lebih mendalam dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta diharapkan dapat ditemukan teori baru tentang fenomena masalah yang terjadi sebenarnya di lapangan.

PEMBAHASAN

Gambaran mengenai hasil analisis berdasarkan Fokus permasalahan yang telah ditentukan peneliti dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai Reformasi Birokrasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang. Kesimpulan dari hasil wawancara sesuai dengan fokus permasalahan yang telah peneliti tentukan adalah sebagai berikut.

1. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang**

Reformasi Organisasi

Organisasi dan tata laksana merupakan alat untuk mencapai visi dan

misi organisasi, pada tahun 2010 pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 salah satu agenda yang dilakukan adalah di bidang organisasi dan tata laksana melalui visi misi serta pembaharuan struktur.

Pada dasarnya dalam pencapaian visi dan misi setiap instansi/lembaga pemerintahan yang berada dilapisan paling bawah khususnya UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal harus selaras dengan visi misi daerah dalam perwujudan visi nasional, hal ini juga dipertegas oleh peraturan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu indikator keberhasilan dalam merumuskan visi misi organisasi yaitu memperbaiki individu yang ada di dalam organisasi dengan pembaharuan struktur organisasi dengan hasil koreksi tupoksi setiap pegawai agar menjadi pedoman. bahwa dengan adanya evaluasi serta penilaian kinerja setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Pemda Kabupaten Sumedang yang merujuk pada perubahan struktur organisasi serta koreksi tupoksi setiap pegawai. Hal tersebut merupakan salah satu pembaharuan struktur organisasi di internal UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal.

Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Bahwa dengan adanya kewenangan yang sangat jelas kepada UPT akan dapat mudah menjalankan tujuan organisasi seperti melalui deregulasi yang membekukan tupoksi, atau dengan atribusi dan pelimpahan dari pihak dinas/SKPD.

Prosedur Kerja Unit Layanan

Prosedur kerja adalah tata cara dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi setiap pegawai untuk mencapai tujuan organisasi terutama dalam pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang dijadikan ujung tombak peningkatan kualitas layanan kepada publik. Bahwa secara keseluruhan potret Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari aspek pelaksanaan SOP di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal. Secara normatif setiap unit layanan UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal memiliki SOP, Namun jika merujuk pada hasil observasi peneliti masih ada permasalahan terkait informasi layanan kepada publik melalui alur/bagan pelayanan untuk mempermudah dalam melaksanakan pelayanan yang akan ditempuh oleh penerima manfaat.

Penempatan Pegawai sesuai Keahlian

Dalam pencapaian tujuan organisasi penempatan pegawai merupakan hal yang penting untuk berlangsungnya aktivitas organisasi yang diharapkan serta tepat guna. Hasil dokumentasi dan teori, maka dapat peneliti simpulkan bahwa secara keseluruhan rotasi jabatan yang hampir sering dilakukan setiap tahunnya oleh Bupati Sumedang masih belum efektif karena belum bisa memberikan waktu adaptasi kerja yang cukup bagi pegawai, rotasi jabatan masih belum didasarkan kepada penilaian kerja yang objektif. Faktanya, Asesmen kompetensi belum dilaksanakan secara menyeluruh untuk staf, untuk golongan IV dan III belum dilaksanakan, namun sudah hanya eselon II, III, IV dan III-A.

e. Porsi Pelatihan

Salah satu untuk meningkatkan kapasitas kinerja pegawai adalah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang didasarkan kepada kebutuhan pelatihan pegawai. Bahwa secara keseluruhan proporsi pelatihan bagi pegawai UPT

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal sudah banyak dilaksanakan, baik yang diselenggarakan oleh pemda sumedang yang bersumber APBD maupun UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal. Namun, dari jenis pelatihan yang ada masih belum didasarkan kepada analisis kebutuhan pelatihan pegawai dan mencakup keseluruhan asosiasi tani sumedang agar lebih efektif.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kerja merupakan cara penilaian proses kerja suatu penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. ahwa Secara keseluruhan evaluasi kerja yang diterapkan oleh UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal salah satunya adalah dengan menerapkan absen elektronik pegawai yang memiliki fungsi sebagai sensor Absensi Sidik Jari atau *Smart Card* dengan database *system* sehingga data kehadiran, keterlambatan bisa terekapitulasi dan ditampilkan sebagai laporan dalam sebuah *report*.

2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi. Secara Keseluruhan dalam hal budaya organisasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal masih mengalami permasalahan, faktanya budaya organisasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal

masih kurang kondusif hal ini terlihat pada hasil observasi peneliti yang mengatakan bahwa pimpinan dalam hal ini pimpinan masih bertindak otoriter.

Efektifitas Struktur Organisasi

Struktur kelembagaan yang efektif secara jumlah SDM akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan bila mana jumlah SDM secara kuantitas cukup majemuk namun minim fungsi. Secara keseluruhan pelayanan di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal dijalankan dengan standar operasional prosedur yang ada saat ini, namun ada beberapa jenis layanan yang masih belum dibuatkan SOP nya seperti kemudahan untuk penerima manfaat dalam mengakses layanan melalui bagan/alur pelayanan yang secara *ril* memberikan informasi proses layanan yang akan ditempuh.

Kesejahteraan Pegawai

Kesejahteraan pegawai adalah pemenuhan kebutuhan pegawai oleh organisasi. Kesejahteraan yang dilakukan oleh organisasi bertujuan untuk memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun jasmani guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang baik didalam bekerja. dengan adanya kesejahteraan pegawai atau kompensasi yang baik dan maksimal, pegawai dapat memperoleh beberapa hal diantaranya adalah motivasi kerja, loyalitas bekerja, kesehatan fisik dan mental yang terjaga, serta memperkuat relasi dan hubungan kerja antar pegawai. Maka dari itu kesejahteraan pegawai bagi setiap pegawai baik PNS dan Non-PNS diharuskan agar tujuan organisasi UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal hendak tercapai.

Tanggungjawab

Membentuk budaya tanggung jawab di kantor ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semua orang merasa perlu melakukan pekerjaan dengan baik.

Sebagian pegawai yang bekerja hanya untuk menunggu gaji di akhir bulan mungkin hanya mengeluarkan upaya seadanya. Secara keseluruhan cara membentuk budaya adalah dengan menentukan langkah aksi, memberikan ruang partisipasi bagi pegawai serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan rasa tanggungjawabnya

Pembagian kerja

Pembagian kerja timbul disebabkan bahwa seseorang mempunyai kewenangan serta kemampuan terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh Karena itu pembagian kerja berarti bahwa kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus ditentukan dan dikelompokkan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. secara keseluruhan dalam hal pembagian kerja sudah sesuai dengan kemampuan dimasing masing bidang, hal tersebut didukung dengan adanya uji kompetensi pegawai yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada calon penerima jabatan yang akan di amanatkannya.

3. Strategi Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Evaluasi struktur organisasi

Evaluasi struktur organisasi salah satunya adalah mengenai Struktur organisasi tata kerja yang didasarkan pada kompetensi pegawai untuk memperoleh SDM tepat guna dalam mencapai tujuan organisasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal . Bahwa secara keseluruhan evaluasi struktur organisasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal sejauh ini masih dilakukan melalui absen elektronik dengan melihat report laporan kehadiran, dan pelibatan lembaga masyarakat di lingkungan UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal meskipun belum dilaksanakan secara rutin oleh UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatininggal .

Rasionalisasi pegawai

Secara Keseluruhan di pemerintah UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal belum melaksanakan rasionalisasi pegawai karena belum ada regulasi yang menginstruksikan secara khusus mengenai pemangkas pegawai. Disisi lain dengan jumlah SDM saat ini dirasa sangat efektif meskipun hak yang didapatkan belum layak.

Media Pengaduan layanan

Pengaduan masyarakat diperuntukan sebagai media keluhan, pengaduan, sumbang pikiran, gagasan atau saran yang bersifat membangun baik mengenai instansi pemerintah atau swasta yang disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Secara Keseluruhan informan menganggap bahwa media pengaduan masyarakat sangat begitu penting untuk mengevaluasi internal organisasi, namun fakta yang terjadi kotak pengaduan di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal untuk menampung keluhan keluhan masyarakat masih belum tersedia.

Perencanaan penganggaran berbasis partisipasi publik

Dalam proses pembangunan daerah partisipasi publik merupakan modal penting untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan. secara keseluruhan upaya nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memeberikan ruang berpartisipasi kepada masyarakat yaitu dengan adanya musrenbang yang nantinya menghasilkan dokumen perencanaan serta didalamnya tertuang usulan usulan program yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat melalui skala prioritas.

PENUTUP

Berdasarkan uraian peneliti mengenai Reformatasi Birokrasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal Kabupaten

Sumedang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

Tidak ada program yang bersifat indikatif di bidang ekonomi yang menyentuh pertanian tahun 2016 (RKA-2016) ini berdampak pada rendahnya pencapaian visi misi "Peningkatan ekonomi yang berdaya saing dan berkualitas sektor pertanian" hal ini kurang di dukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Masih ada permasalahan terkait informasi layanan kepada publik melalui alur/bagan pelayanan untuk mempermudah dalam melaksanakan pelayanan yang akan ditempuh oleh penerima manfaat.

Rotasi jabatan masih belum didasarkan kepada penilaian kerja yang objektif karena faktanya Asesmen kompetensi belum dilaksanakan secara menyeluruh untuk staf, untuk golongan IV dan III belum dilaksanakan, namun sudah hanya eselon II, III, IV dan III-A.

Secara keseluruhan proporsi pelatihan bagi pegawai UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal sudah banyak dilaksanakan baik yang diselenggarakan oleh pemda sumedang yang bersumber APBD maupun UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal. Namun, dari jenis pelatihan yang ada masih belum didasarkan kepada analisis kebutuhan pelatihan pegawai agar lebih efektif.

2. Hambatan Hambatan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Budaya organisasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal masih mengalami permasalahan, faktanya budaya organisasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal masih kurang kondusif hal ini terlihat pada hasil

observasi peneliti yang mengatakan bahwa pimpinan masih bertindak otoriter.

Kerjasama struktur kelembagaan di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal cukup baik karena sejauh ini dalam penyelesaian tugas dan pekerjaannya setiap bidang selalu melakukan koordinasi yang intensif, fakta yang terjadi selesainya dokumen RKA UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal tidak terlepas koordinasi yang baik antara kasubag dengan Dinas.

Secara Keseluruhan Kinerja di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal sangat terbantu dengan tenaga sukwan yang ada saat ini, namun akan lebih baik jika tenaga sukwan diberikan honor yang layak untuk lebih meningkatkan motivasi kerja serta memiliki rasa tanggungjawab.

Beberapa jenis layanan yang masih belum dibuatkan SOP-nya guna kemudahan untuk penerima manfaat dalam mengakses layanan melalui bagan/alur pelayanan secara *ril* memberikan informasi proses layanan.

3. Strategi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

Evaluasi struktur organisasi sejauh ini masih dilakukan melalui absen elektronik dengan melihat laporan kehadiran.

Belum ada regulasi yang menginstruksikan secara khusus mengenai pemangkasan pegawai. Disisi lain jumlah SDM saat ini dirasa sangat efektif meskipun hak yang didapatkan belum layak.

Media pengaduan masyarakat begitu penting untuk mengevaluasi internal organisasi, namun yang terjadi kotak pengaduan di UPT untuk menampung keluhan masyarakat masih belum tersedia.

Memberikan ruang berpartisipasi kepada masyarakat yaitu dengan adanya musrenbang yang akan menghasilkan

dokumen perencanaan serta didalamnya tertuang usulan-usulan program yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat melalui skala prioritas.

Pada akhirnya, peneliti ingin menuliskan beberapa saran sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jatinunggal, yaitu sebagai berikut.

1. Mengingat bidang pertanian merupakan isu pembangunan yang strategis bagi Kabupaten Sumedang, sebaiknya Pemerintah Daerah memprioritaskan program-program yang berkaitan pada bidang pertanian, hal ini dapat diwujudkan dalam program atau kegiatan
2. Guna mewujudkan sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas sebaiknya dilakukan Asesmen kompetensi pada jabatan-jabatan yang memiliki peran penting
3. Sebaiknya adan pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya, terutama bagi penyuluh dan tenaga sukwan.
4. Guna mewujudkan standar pelayanan, sebaiknya dibuatkan standar oprasional prosedur pada setiap unit pelayanan di UPT.
5. Sebagai wujud maklumat pelayanan dan evaluasi kerja sebaiknya disediakan kotak pengaduan layanan bagi masyarakat.
6. Sebaiknya harus ada regulasi yang mengatur secara oprasional dan teknis mengenai pemangkasan atau rasionalisasi pegawai seperti Perda, Perbup yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Dalam menyusun rencana kerja dinas, sebaiknya pihak Dinas melibatkan yang berkepentingan terkait penyusunan rencana anggaran kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akadun. 2012. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Gronroos, C. 2011. *Service Management and Marketing: Managing The Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: Lexington.
- Hasibuan, Malayu, S. P. 2013. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, Jusman. 2014. *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riyanto, Agus. 2009. *Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan: Dilengkapi Uji Validitas dan Reliabilitas serta Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- STIA Sebelas April Sumedang. 2015. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya: Cetakan II*. Jakarta: CV. Rajawali.
- , 2014. *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wardah, Ernawati. 2012. *EYD & Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Widiaswari, Roro Rukmini. 2013. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru*. (Tesis) Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Banjarmasin: Program Pascasarjana Universitas Achmad Yani Banjarmasin. [online]. Tersedia: <http://www.google.co.id.html> [20 Maret 2014].